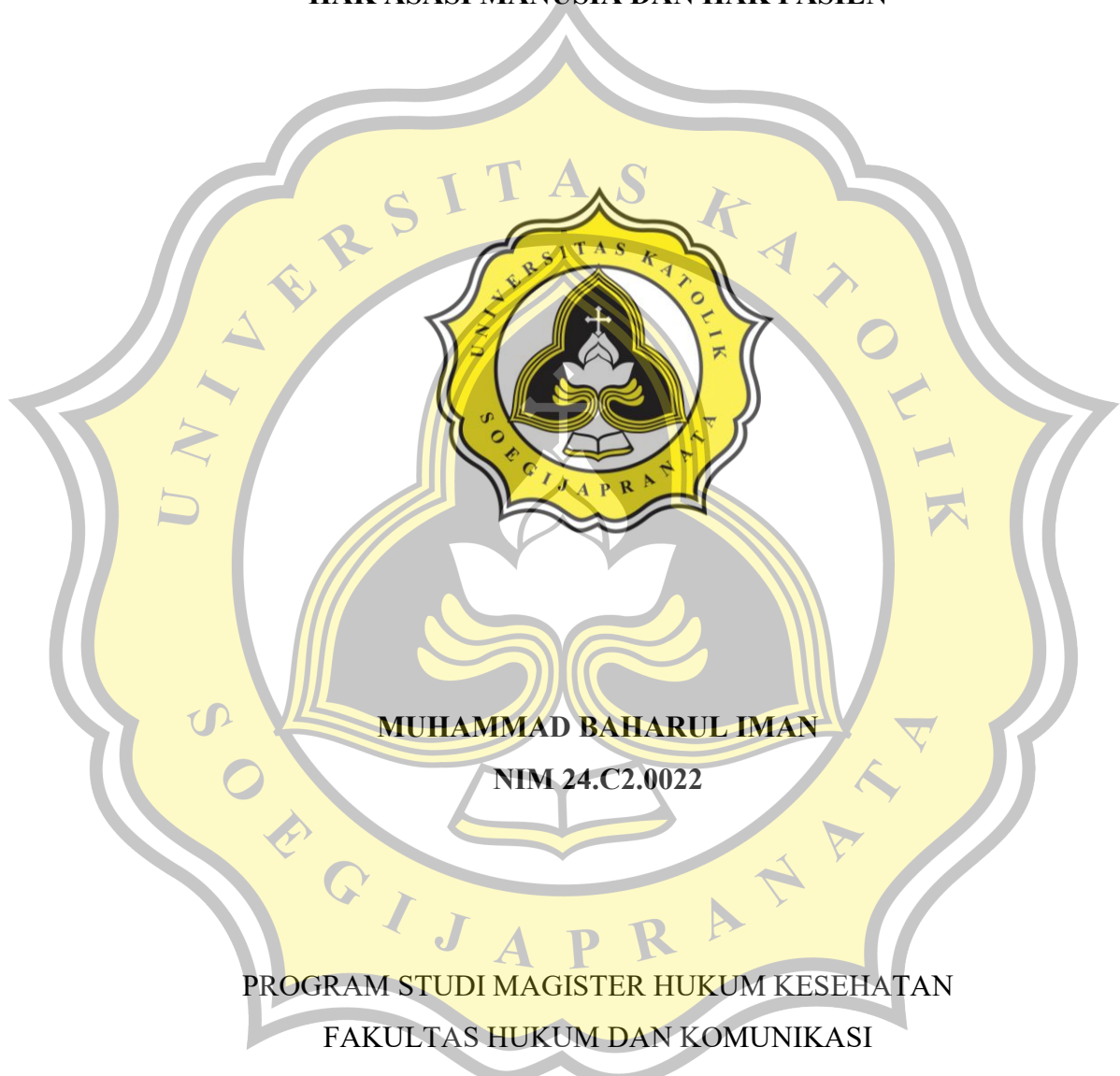


LAPORAN TESIS

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERIKSAAN HIV SEBAGAI
SKRINING PRAOPERASI BEDAH DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN
HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PASIEN**



MUHAMMAD BAHARUL IMAN

NIM 24.C2.0022

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

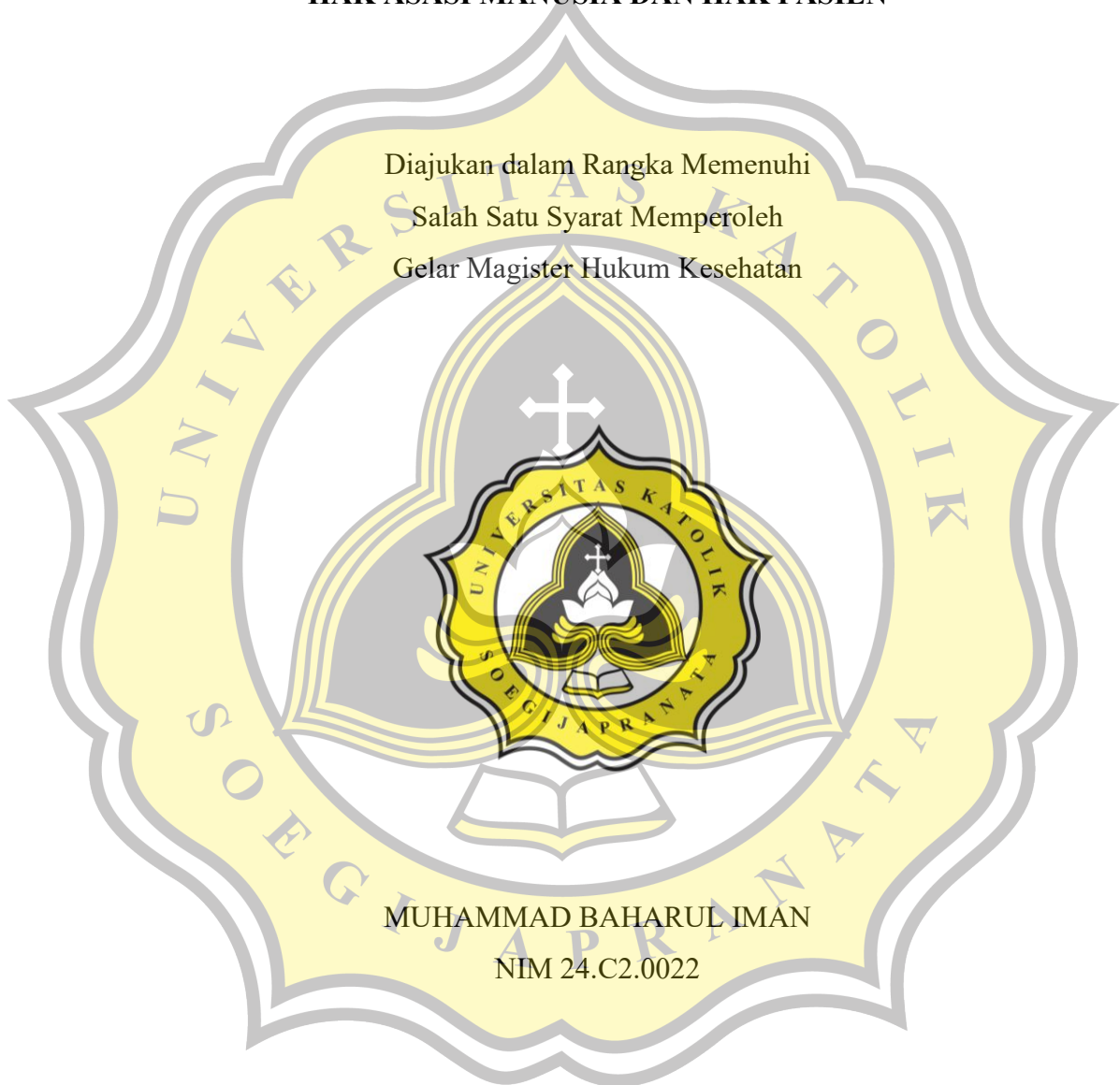
SEMARANG

2026

LAPORAN TESIS

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERIKSAAN HIV SEBAGAI SKRINING PRAOPERASI BEDAH DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PASIEN

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



MUHAMMAD BAHARUL IMAN
NIM 24.C2.0022

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pemeriksaan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebagai skrining praoperasi di rumah sakit menimbulkan dilema hukum dan etika antara perlindungan keselamatan tenaga medis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta hak pasien. Di satu sisi, skrining HIV dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko penularan infeksi kepada tenaga kesehatan selama tindakan bedah. Namun di sisi lain, penerapan pemeriksaan tersebut berpotensi melanggar prinsip otonomi pasien, privasi, dan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) apabila dilakukan tanpa penjelasan yang memadai atau tanpa persetujuan pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemeriksaan HIV sebagai skrining praoperasi, implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hak pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode yuridis empiris yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mewajibkan pemeriksaan HIV sebagai skrining praoperasi dalam hukum positif di Indonesia. Pemeriksaan tetap tunduk pada prinsip *informed consent*. Namun dalam implementasi, ditemukan adanya pelaksanaan pemeriksaan HIV yang tidak disertai penjelasan yang memadai atau tanpa persetujuan yang sah, serta adanya variasi implementasi yang bergantung pada kebijakan internal rumah sakit dan pertimbangan klinis dokter penanggung jawab pelayanan. Hambatan utama dalam implementasi meliputi belum adanya aturan yang seragam, kultur pelayanan dan stigma HIV, serta dilema kepentingan keselamatan tenaga medis dan penghormatan hak pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan proporsional terkait pemeriksaan HIV sebagai bagian dari skrining praoperasi.

Kata kunci: skrining HIV praoperasi, hak asasi manusia, hak pasien, *informed consent*, keselamatan tenaga medis.

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) testing as a preoperative screening procedure in hospitals raises legal and ethical dilemmas between the protection of healthcare workers' safety and respect for human rights and patient rights. On the one hand, HIV screening is considered a preventive measure to reduce the risk of infection transmission to healthcare personnel during surgical procedures. On the other hand, the implementation of such testing may potentially violate the principles of patient autonomy, privacy, and informed consent if conducted without adequate explanation or without the patient's consent. This study aims to analyze the legal framework governing HIV testing as a preoperative screening procedure, its implementation in hospital healthcare practices, and the obstacles encountered in its application from the perspective of human rights and patient rights. The research employs a socio-legal approach with an empirical juridical method that combines normative analysis of laws and regulations with empirical data obtained through interviews. The findings indicate that, normatively, there is no explicit legal provision mandating HIV testing as a preoperative screening requirement under Indonesian positive law. HIV testing remains subject to the principle of informed consent. However, in practice, there are instances where HIV testing is conducted without adequate explanation or without valid consent, as well as variations in implementation depending on hospital policies and the clinical judgment of the attending physician. The main challenges in implementation include the absence of uniform regulations, the influence of healthcare service culture and HIV-related stigma, as well as the dilemma between protecting healthcare workers' safety and respecting patient rights. Therefore, clearer and more proportionate regulations are required regarding HIV testing as part of preoperative screening.

Keywords: *preoperative HIV screening, human rights, patient rights, informed consent, healthcare worker safety*